



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	5
I. Pendahuluan	6
A. Landasan Hukum	6
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Data Organisasi	7
D. Sistematika Penulisan	12
II. Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis (RENSTRA)	13
1) Visi dan Misi	15
2) Tujuan dan Sasaran	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
III. Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	27
IV. Penutup	32
A. Kesimpulan	32
B. Saran	32



Bab I

Pendahuluan

A. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2024 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

B. Maksud dan Tujuan

- **Maksud.**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik periode 2021-2026.

- **Tujuan**

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, penyusunan laporan ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik periode 2021-2026.



Laporan ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikutnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

C. Data Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam rangka melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Tugas yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan perumusan, pengendalian dan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

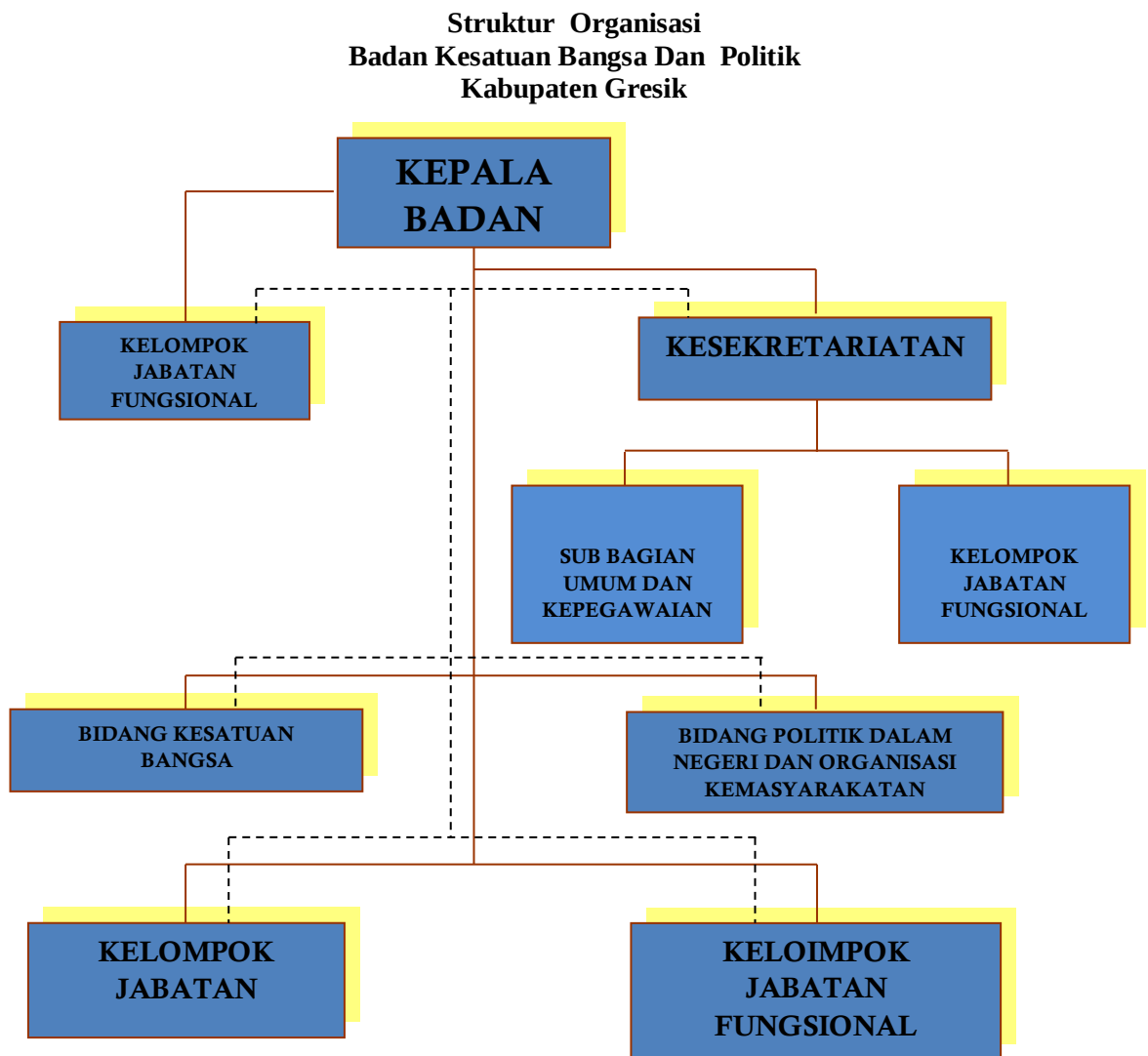
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mempunyai fungsi sebagai :

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
2. Pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang fungsinya.

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, Membawakan ;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;



Secara operasional, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 25 (Dua Puluh Tujuh) Orang, 13 laki-laki



dan 6 perempuan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 Orang sebagai tenaga non PNS. Secara rinci data aparatur/ pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Susunan pegawai menurut Jabatan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik
Kabupaten Gresik**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang
4	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	1 Orang
5	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1 Orang
6	Kelompok Jabatan Fungsional	2 Orang

**Jumlah Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik
berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)							
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)							
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)							
	Pengatur (IIc)		1		1			2
	Pengatur Tingkat I (IId)			1				1
3.	Penata Muda (IIIa)					2		2



	Penata Muda Tingkat I (IIIb)			1		3		4
	Penata (IIIc)					1		1
	Penata Tingkat I (IIId)					5		5
4.	Pembina (IVa)						3	3
	Pembina Tingkat I (IVb)							
	Pembina Utama Muda (IVc)						1	1
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (IVe)							
5	Tenaga Non PNS							
	JUMLAH		1	2	1	11	4	19



Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

*Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gresik Tahun 2024*

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Ruang Kerja	1 buah
2.	Meja	35 buah
3.	Telepon	1 buah
4.	Faximil	1 buah
5.	Kursi	52 buah
6.	Komputer	15 unit
7.	Printer	4 unit
8.	Kendaraan Roda 4 (Toyota Kijang)	6 unit
9.	TV	2 buah
10.	Handycam	1 buah
11.	Lemari ES	1 buah
12.	AC	9 buah
13.	Filling Cabinet	13 buah
14.	Lemari Arsip (Kayu)	6 buah
15.	Note Book	7 Unit
16.	Mobile File	3 Unit
17.	Kamera	2 Unit



D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

RPJMD Kabupaten Gresik periode 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik adalah :

1. Gresik yang lebih mandiri

Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

2. Gresik yang Sejahtera

Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada

masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

3. Gresik yang Berdaya Saing

Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GERBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

4. Gresik yang Berkemajuan

Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta

mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

5. Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah

Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Adapun penetapan Visi Kabupaten Gresik periode 2021-2026 adalah *“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”*



Sedangkan untuk Misi Kabupaten Gresik periode 2016-2021 ada 5 (Lima) yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Sedangkan dari penjabaran misi tersebut kemudian dituangkan dalam Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan
- b. Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi dalam Masyarakat

Sebagaimana disebutkan di atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Laksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik diberikan tugas untuk melaksanakan perumusan, pengendalian dan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
2. Pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;



3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang fungsinya.

1) Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

a. Visi

Terwujudnya kehidupan yang dinamis, aman, damai dan menjunjung tinggi nilai persatuan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilakukan yaitu :

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas berdemokrasi dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.
3. Pengembangan sistem intelijen, pencegahan dan penanganan konflik sosial masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan umat beragama, organisasi, LSM dan menjalin hubungan antar lembaga, instansi dan masyarakat.
5. Memberikan pelayanan prima dan berakhlak mulia.

2) Tujuan dan Sasaran

Untuk penerapan dari visi dan misi Bangsa Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, terdapat tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :



a. Tujuan.

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku, ras, agama;
2. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap, kewajiban dan hak serta tanggungjawab dalam kehidupan berpolitik yang tertib, aman dan dinamis, serta dalam suasana yang harmonis;
3. Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi terjadinya berbagai peristiwa konflik sosial;
4. Terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi, lembaga, ormas, LSM maupun masyarakat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
5. Terlaksananya kegiatan pembinaan penyakit masyarakat, minuman keras, narkoba, perjudian kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum;
6. Tersedianya SDM organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang profesional sesuai dengan fungsinya;
7. Terlesenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
8. Tersedianya Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yang profesional, bersih dan berwibawa yang didukung sikap mental dan perilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma hukum dan agama.

b. Sasaran.

Untuk sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda;



2. Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah;
3. Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat;
4. Meningkatnya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual secara cepat dan tepat;
5. Menurunnya penyalagunaan minuman keras, narkoba, perjudian oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum;
6. Meningkatnya kualitas SDM organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya;
7. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
8. Meningkatkan tertib administrasi keuangan, SDM, perkantoran serta akuntabilitas pelayanan;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET
1	Menurunnya Konflik Sosial	• Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD • Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan • Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar • Persentase Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan • Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi • Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2024 diukur dari tingkat capaian keberhasilan tujuan dan sasaran strategis. Mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, dan juga pada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2024.

Berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis maka pengukuran kinerja selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100 %	100 %	100 %	Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik telah berusaha melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut	Masih diperlukan penguatan perencanaan, peningkatan kompetensi pegawai,



	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	100 %	Menunjukkan bahwa program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan telah menjangkau lembaga pendidikan sesuai target yang ditetapkan.	Menjalin kerja sama dengan instansi lain (Dinas Pendidikan, Kemenag, organisasi kepemudaan) untuk berbagi sumber daya.
	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100 %	100 %	100 %	Tercapai dikarenakan pada tahun 2024 Terlaksananya Kegiatan Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Menyarankan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan



	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar	100 %	100 %	100 %	Hal ini karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Gresik	Menyarankan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan
	Persentase Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %	Hal ini karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Gresik dengan menggunakan Teknologi Informasi	Menyarankan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan
	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat	100 %	100 %	100 %	Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Terlaksananya Kegiatan	menyarankan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan



	Beragama yang difasilitasi				Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya	
	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100 %	100 %	100 %	Hal ini karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penangan Konflik Sosial	menyarankan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan

- Analisa Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja selama tahun 2024 yang dijabarkan dalam tabel di atas perlu dianalisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran dengan sejumlah indikator. Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Gresik telah berusaha melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Hasil analisis pencapaian target terhadap masing-masing sasaran dan indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
-------------------	-------------------------	--------	-----------	-----------------



Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100 %	100 %	100 %
---------------------------	---	-------	-------	-------

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pada sasaran dengan indikator pertama untuk Ketercapaian sasaran program OPD yang dapat diselesaikan. Dari 6 konflik yang terjadi keseluruhan dapat diselesaikan berarti memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini karena tingkat kepatuhan masyarakat Gresik kepada pemerintah sangat tinggi dan menyarankan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pada sasaran dengan indikator kedua untuk Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Dari target yang ingin dicapai 100% realisasinya 100 % berarti memenuhi target yang diinginkan, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Terlaksananya Kegiatan Memperkuat Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan pada masyarakat Kabupaten Gresik yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Gresik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pada sasaran dengan indikator ketiga untuk Persentase Target Partisipasi Masyarakat. Dari target yang ingin dicapai 100% realisasinya 100 % berarti memenuhi target yang diinginkan , hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Terlaksananya Kegiatan Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan menyarankan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pada sasaran dengan indikator keempat untuk Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar yang dapat dilaksanakan. Dari target yang ingin dicapai 100 % dan realisasinya 100 % berarti memenuhi target yang diinginkan. Hal ini karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Gresik dan menyarankan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan.



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pada sasaran dengan indikator kelima untuk Kegiatan Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dapat dilaksanakan. Dari target yang ingin dicapai 100 % dan realisasinya 100 % berarti memenuhi target yang diinginkan. Hal ini karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Gresik dengan menggunakan Teknologi Informasi dan menyarankan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pada sasaran dengan indikator keenam untuk Kegiatan Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi yang dapat dilaksanakan. Dari target yang ingin dicapai 100 % dan realisasinya 100 % berarti memenuhi target yang diinginkan. hal ini

dikarenakan pada tahun 2024 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan menyarankan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pada sasaran dengan indikator ketujuh untuk Kegiatan Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa yang dapat dilaksanakan. Dari target yang ingin dicapai 100 % dan realisasinya 100 % berarti memenuhi target yang diinginkan. Hal ini karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial dan menyarankan agar kegiatan seperti ini terus dilanjutkan.

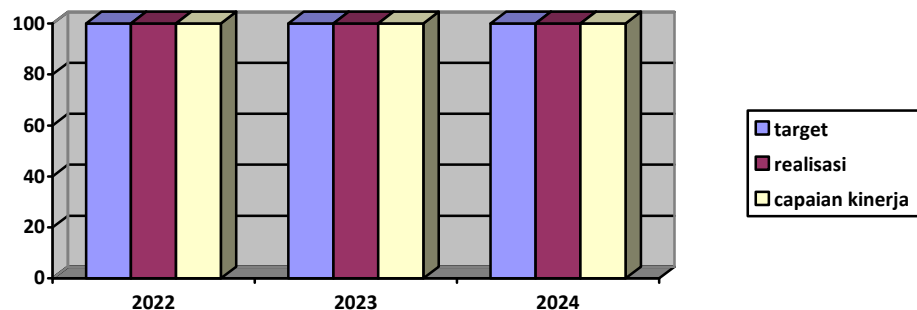
Kemudian untuk mengetahui meningkat atau menurunnya kinerja program dan kegiatan tahunan diperlukan analisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Analisis pencapaian sasaran pertama dari indikator pertama :



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	2022	100 %	100 %	100 %
		2023	100 %	100 %	100 %
		2024	100 %	100 %	100 %

Grafik analisis pencapaian sasaran dari indikator pertama



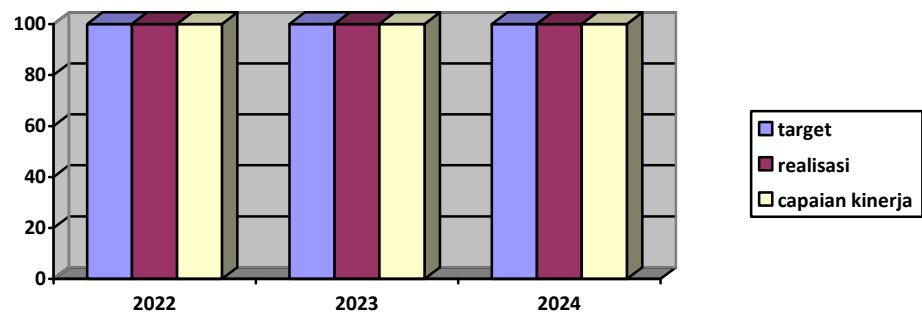
dilihat dari tabel atau grafik di atas maka hasil analisis pencapaian sasaran dari indikator pertama tersebut dapat dijelaskan bahwa Ketercapaian Sasaran Program OPD dilihat dari realisasi kinerja ditahun 2024 dibanding tahun 2023 dan 2022 adalah sama yaitu sebesar 100 %.

Analisis pencapaian sasaran pertama dari indikator kedua



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2022	100 %	100 %	100 %
		2023	100 %	100 %	100 %
		2024	100 %	100 %	100 %

Grafik analisis pencapaian sasaran dari indikator kedua

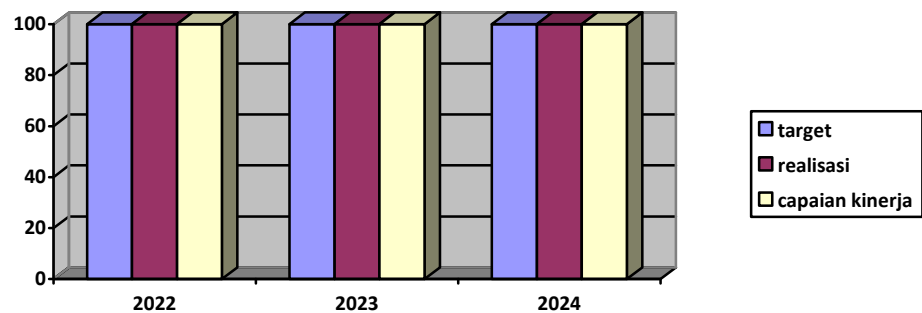


dilihat dari tabel atau grafik di atas maka hasil analisis pencapaian sasaran dari indikator kedua tersebut dapat dijelaskan bahwa Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilihat dari realisasi kinerja ditahun ditahun 2024 dibanding tahun 2023 dan 2022 adalah sama yaitu sebesar 100 %.

Analisis pencapaian sasaran pertama dari indikator ketiga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	2022	100 %	100 %	100 %
		2023	100 %	100 %	100 %
		2024	100 %	100 %	100 %

Grafik analisis pencapaian sasaran dari indikator ketiga



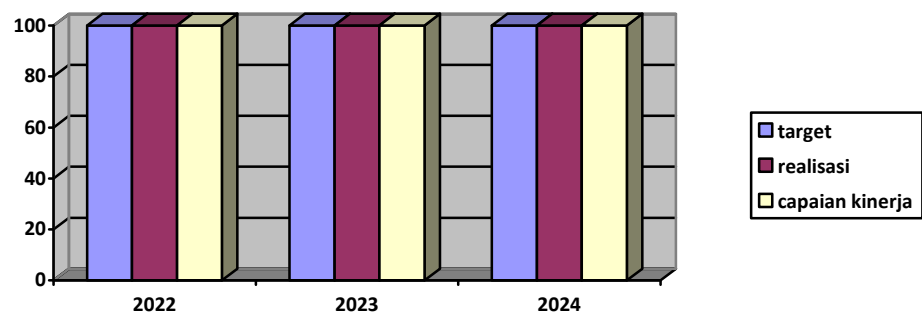
dilihat dari tabel atau grafik di atas maka hasil analisis pencapaian sasaran dari indikator ketiga tersebut dapat dijelaskan bahwa Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dilihat dari realisasi kinerja ditahun ditahun 2024 dibanding tahun 2023 dan 2022 adalah sama yaitu sebesar 100 %.

Analisis pencapaian sasaran pertama dari indikator keempat



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Presentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar	2022	100 %	100 %	100 %
		2023	100 %	100 %	100 %
		2024	100 %	100 %	100 %

Grafik analisis pencapaian sasaran dari indikator keempat

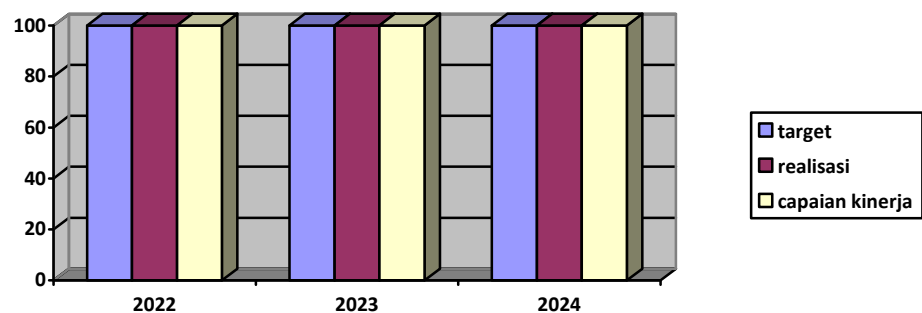


dilihat dari tabel atau grafik di atas maka hasil analisis pencapaian sasaran dari indikator keempat tersebut dapat dijelaskan bahwa Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilihat dari realisasi kinerja ditahun 2024 dibanding tahun 2023 dan 2022 adalah sama yaitu sebesar 100 %.

Analisis pencapaian sasaran pertama dari indikator kelima

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2022	100 %	100 %	100 %
		2023	100 %	100 %	100 %
		2024	100 %	100 %	100 %

Grafik analisis pencapaian sasaran dari indikator kelima



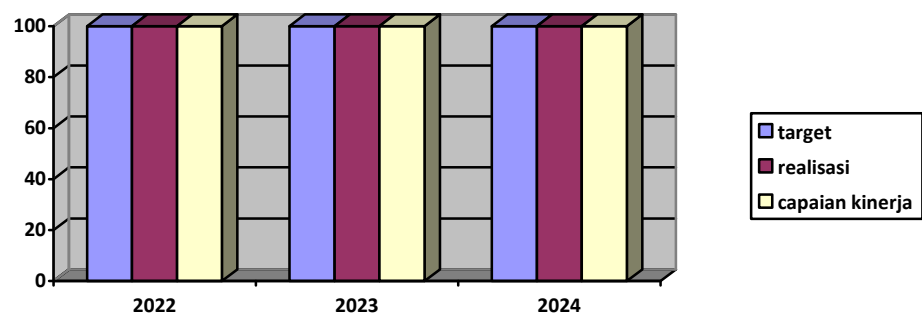
dilihat dari tabel atau grafik di atas maka hasil analisis pencapaian sasaran dari indikator kelima tersebut dapat dijelaskan bahwa Program Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilihat dari realisasi kinerja ditahun 2024 dibanding tahun 2023 dan 2022 adalah sama yaitu sebesar 100 %.

Analisis pencapaian sasaran pertama dari indikator keenam



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	2022	100 %	100 %	100 %
		2023	100 %	100 %	100 %
		2024	100 %	100 %	100 %

Grafik analisis pencapaian sasaran dari indikator keenam



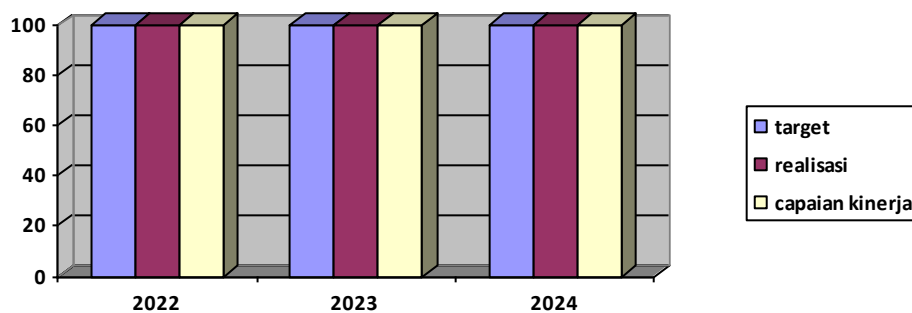
dilihat dari tabel atau grafik di atas maka hasil analisis pencapaian sasaran dari indikator keenam tersebut dapat dijelaskan bahwa Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dilihat dari realisasi kinerja ditahun 2024 dibanding tahun 2023 dan 2022 adalah sama yaitu sebesar 100 %.

Analisis pencapaian sasaran pertama dari indikator ketujuh



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	2022	100 %	100 %	100 %
		2023	100 %	100 %	100 %
		2024	100 %	100 %	100 %

Grafik analisis pencapaian sasaran dari indikator ketujuh



dilihat dari tabel atau grafik di atas maka hasil analisis pencapaian sasaran dari indikator ketujuh tersebut dapat dijelaskan bahwa Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial dilihat dari realisasi kinerja ditahun 2024 dibanding tahun 2023 dan 2022 adalah sama yaitu sebesar 100 %.

B. Realisasi Anggaran



Target dan Realisasi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 82.953.008.185,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.411.941.302,06 atau selisih kurang anggaran sebesar Rp. 3.541.066.882,94 atau 4,27%

Sesuai standarisasi akuntansi pemerintahan penjabaran belanja terinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, belanja yang digunakan untuk Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan insentif lainnya. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.350.101.752,- yang direalisasikan sebesar Rp. 3.224.619.833,78 dan terjadi selisih lebih anggaran sebesar Rp. 125.481.952,22 atau 3,75%
2. Belanja Barang dan Jasa, berupa Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.171.574.349,- yang direalisasikan sebesar Rp. 4.009.261.264,96 dan terjadi selisih lebih anggaran sebesar Rp. 3.162.313.084,04 atau 44,10%

Belanja Langsung adalah anggaran belanja yang digunakan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing seksi yaitu :

- a. Belanja Barang, digunakan untuk pengeluaran belanja barang pakai habis, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.487.311.670,- yang direalisasikan sebesar Rp. 948.108.229,- dan terjadi selisih lebih anggaran sebesar Rp. 539.203.441 atau 36,25%
- b. Belanja Jasa, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.934.606.179,- yang direalisasikan sebesar Rp. 1.639.349.610,- dan terjadi selisih lebih anggaran sebesar Rp. 1.295.256.569,- atau 44,14%
- c. Belanja Pemeliharaan, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 242.790.000,- yang direalisasikan sebesar Rp. 235.669.957,- dan terjadi selisih lebih anggaran sebesar Rp. 7.120.043,- atau 2,93%
- d. Belanja Perjalanan Dinas, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.375.826.500,- yang direalisasikan sebesar Rp.



517.703.468,96 dan terjadi selisih lebih anggaran sebesar Rp. 858.123.031,04 atau 62,37%

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.131.040.000,- yang direalisasikan direalisasikan sebesar Rp. 668.430.000,- dan terjadi selisih lebih anggaran sebesar Rp. 462.610.000 atau 40,90%



Realisasi anggaran dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2024 dari program kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t	Realisasi	Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.488.804,-	25.870.000,-	72,90%
					Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	610.597.448,-	475.003.000,-	77,79%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	192.760.949,-	176.988.105,-	91,82



					Kantor			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.047.720,-	15.525.070,-	53,45%
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.963.375,-	14.288.375,-	62,22%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12.916.000,-	5.416.000,-	41,93%
					Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247.423.000,-	224.045.014,9 6	90,55%



					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.972.000,-	171.855,348,-	99,93%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.610.000,-	38.376.244,-	99,39%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	134.400.000,-	134.270.263,-	99,90%



					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.440.000,-	11.525.000,-	70,10%
					Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.327.000,-	87.689.112,-	97,07%
	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan	100%	100%	100%	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	1.426.309.121,-	1.317.630.200,-	92,38%



	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Bela, Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela, Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	1.559.911.306,-	1.064.685.479,-	68,25%



					Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha	58.786.104.22 3,-	58.082.611.4 53,-	98,80%



					n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	6.037.817.159, -	5.779.529.160, -	95,72%



					Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			
	Presentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar	100%	100%	100%	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	306.749.919, -	117.637.950, -	38,35%



					Ormas, Pengawasan Ormas dan Asing Di Daerah			
	Persentase Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Organsisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan			



					Asing Di Daerah			
	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800.000.000, -	800.000.000, -	100%



					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	105.000.000, -	3.716.000,-	3,54%
	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat	100%	100%	100%	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	834.950.000, -	501.109.991, -	60,02%



	Kecamatan dan Desa				Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen.			
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	8.045.072.60 0,-	7.139.549.70 3,32	88,74%



Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas dan tanggungjawab dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik dan Keorganisasian di Wilayah Kabupaten Gresik juga pengkajian masalah aktual dalam hal menjaga kondusifitas dan nyaman dihuni bagi siapa saja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Berbagai capaian strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun ada beberapa kegiatan yang belum maksimal dilaksanakan secara menyeluruh.

B. Saran

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran berjalan.

Langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual dibidang kesatuan bangsa dan politik agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.